

KESIAPAN PUSDIKLAT MIGAS UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PROGRAM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (QUICK WINS) DI KESDM

Oleh : Drs. Buntaram *)

ABSTRAK

Memasuki Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014) di Tahun Keempat, KESDM telah mengajukan road map pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Menteri PAN dan RB untuk menunggu pengesahannya. Didalam suatu Road Map umumnya terdapat program Quick wins. Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat.

*Berdasarkan program-program Reformasi Birokrasi berorientasi kepada hasil (outcomes oriented programs); isi Lampiran PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta **pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan**. Dimana program tersebut memiliki keterkaitan dan kesesuaian (link and match) dengan misi Pusdiklat Migas “Pengembangan SDM” dalam hal ini khususnya disub sektor migas.*

Menyadari tingkat kesesuaian tujuan program Quick wins dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimungkinkan peranan Pusdiklat Migas sesuai Tupoksinya sebagai unit satuan kerja eselon II dibawah KESDM dapat berperanan dan berpeluang cukup besar dalam ikut menyiapkan program percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (Quick Wins) KESDM

Pendahuluan

Tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014) di Tahun Keempat sebagai kelanjutan dan meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, yaitu menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga.

Sebagai Juklak dari PERPRES 81/2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Gdrb) 2010-2025, maka disusunlah PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014 beserta lampirannya yang menjelaskan tentang langkah-langkah

yang harus dilakukan ditahun keempat ini adalah:

- melanjutkan sosialisasi dan *public campaign*;
- melakukan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari pemerintah daerah;
- melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda;
- melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda;
- Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

Isi PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010 diatas digunakan sebagai acuan setiap K/L dan Pemda dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Program Percepatan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda.

Kementerian PAN dan RB yang mendapat mandat sebagai percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi dimasing-masing K/L dan Pemda (Ketetapan Pertama PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010) telah menyusun *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KEMENPAN & RB, yang kemudian terbitlah PERMENPAN dan RB Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*.

Quick Wins

Quick wins atau juga sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. *Quick wins* untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa *organization quick wins*, *regulation quick wins* atau *human resource quick wins*;

Perumusan *Quick wins* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, dan dilakukan di awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Merupakan bagian utama (*core business*) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- c. Merupakan sebuah aktivitas nyata (mudah terlihat) yang dapat memberikan dampak perbaikan dan perubahan yang besar dan dapat dirasakan manfaatnya secara cepat sesuai dengan ekspektasi oleh para *stakeholders* utama K/L dan

Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja;

- d. Manfaat perbaikan dan perubahan dapat dirasakan secepatnya (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan).
- e. Memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi;
- f. Memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama K/L dan Pemda.

Program percepatan reformasi birokrasi merupakan program *Quick wins*, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Quick Wins Di KEMENPAN & RB

Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mencanangkan program 9 (sembilan) percepatan Reformasi Birokrasi sebagai kinerja yang berisi langkah-langkah menciptakan birokrasi: bersih dari KKN dan Politisasi, Kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban dan Melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.:

"Penetapan kinerja tersebut sebagai wujud komitmen dan janji sebagai Aparatur Pemerintah untuk melaksanakan tugas yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil pada konteks percepatan reformasi birokrasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (3 Januari 2013).

Kesembilan program percepatan reformasi birokrasi itu, terdiri dari:

- 1) penataan struktur birokrasi;
- 2) penataan jumlah maupun distribusi dan kualitas pegawai negeri sipil (PNS);
- 3) sistem seleksi dan promosi secara terbuka;
- 4) profesionalisme PNS;
- 5) pengembangan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*);

- 6) penyederhanaan perizinan usaha;
- 7) pelaporan harta kekayaan pegawai negeri;
- 8) peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- 9) efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

Quick Wins di KESDM

Bagaimanakah bentuk dan program-program *Quick Wins di KESDM*?

Sampai tulisan ini disusun, dokumen usulan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM yang telah diusulkan dan disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 27 November 2012. (Publikasi KESDM di webmail Selasa, 29 Januari 2013), belum disyahkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sebaiknya sambil menunggu disyahnkannya *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM adalah bijaksana sekali apabila masing-masing unit satuan kerja seperti Pusdiklat Migas telah menyiapkan diri dengan program-program yang menjadi unggulan fungsinya yang sesuai dengan program reformasi birokrasi untuk menjadi pendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Isi Lampiran PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010, program-program Reformasi Birokrasi berorientasi kepada hasil (*outcomes oriented programs*), baik pada tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut ini.

Program tingkat makro	Program tingkat meso	Program tingkat mikro
1) Penataan Organisasi	1) Manajemen Perubahan	1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Tatalaksana	2) Konsultasi dan Asistensi	2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3) Penataan dan Penguatan Organisasi
4) Penguatan Pengawasan	4) Knowledge Management	4) Penataan Tatalaksana
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja		5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		6) Penguatan Pengawasan
		7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tupoksi Pusdiklat Migas

Pusdiklat Migas sesuai Permen ESDM Nomor Nomor: 018 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan Dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral pasal 807 berbunyi; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi.

Adapun fungsinya sesuai pasal 808 Peraturan Menteri ESDM diatas berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi.

Kedua Peraturan Menteri ESDM diatas memberikan amanah kepada Pusdiklat Migas untuk pelaksanaan Pengembangan SDM baik aparatur maupun industri di sub sektor migas.

Kalau kita sinkronkan antara misi Pusdiklat Migas “Pengembangan SDM” disatu sisi dengan salah satu dari butir-butir program Reformasi Birokrasi yang berorientasi kepada hasil (*outcomes oriented programs*), “Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur” pada tingkat makro, “Knowledge Management” pada tingkat meso, dan “Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur” di tingkat mikro pada sisi yang lain maka pada hakekatnya sisi-sisi tersebut suatu program yang saling mengkait dan berkesesuaian (*link and match*).

Penjabaran Program

Selanjutnya masing-masing hasil (*outcomes*) dari program tingkat makro, meso, maupun tingkat mikro, diuraikan sebagai mana dijelaskan dibawah; .

- 1). Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Makro (2010-2014) butir (3). “Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur”
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta ***pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.*** Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah, antar aparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur;
- b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur;
- c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur;
- d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;
- e) ***meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.***

- 2). Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang diharapkan pada Tingkat Meso (2010-2014) butir (4) “Knowledge Management”. Program ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di antara K/L dan Pemda.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) ***meningkatnya profesionalisme SDM aparatur K/L dan Pemda;***
- b) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hasil yang Diharapkan; Tersedianya dan terdesiminasikannya pengetahuan dan pengalaman reformasi birokrasi

- 3). Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Mikro (2010-2014) butir (5) “Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;
- 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;
- 3) meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;
- 4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;
- 5) *meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.*

Penutup.

Dari butir-butir tiga program Reformasi Birokrasi diatas, peranan pengembangan kualitas aparatur menjadi cukup penting dan strategis dalam sasaran reformasi birokrasi, dan merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Institusi Pusdiklat Migas khususnya untuk pengembangan SDM Aparatur di sub sektor migas. Sehingga peranan Pusdiklat Migas sesuai Tupoksinya sebagai unit satuan kerja eselon II dibawah KESDM dapat berperan dan berpeluang cukup besar dalam ikut menyiapkan program percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (*Quick Wins*) KESDM.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Gdrb) 2010-2025
- 2) PERMENPAN dan RB Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
- 3) PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014 beserta lampirannya ;
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral;
- 5) Permen ESDM Nomor Nomor: 018 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan Dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendldlkan Dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral.

*) Penulis adalah Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya Pusdiklat Migas